LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KALURAHAN TRIMURTI

KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

Jalan Srandakan Km. 01 Trimurti Srandakan Bantul 55762

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LKPPD) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2020



KALURAHAN TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SRANDAKAN
KALURAHAN TRIMURTI
ꦏꦭꦸꦫꦲꦤ꧀ ꦠ꧀ꦿꦶꦩꦸꦂꦠꦶ
Alamat : Jl. Raya Srandakan Km. 1 Trimurti, Srandakan Bantul 55762 Telp. (0274) 6464746
Email : desa.trimurti@bantulkab.go.id , website: http://trimurti-bantul.desa.id

Trimurti, 06 Maret 2021

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK)Akhir Tahun Anggaran 2020

Kepada Yth :
Ketua Bamuskal Trimurti
di-
TRIMURTI

Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk mendukung Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka bersama ini kami sampaikan kepada Ketua Bamuskal Trimurti, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran 2020 sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul.

Demikian laporan ini kami sampaikan agar menjadikan bahan pemeriksaan adanya.

Lurah Trimurti

AGUS PURWAKA, ST.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan merupakan ketentuan undang-undang yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan kalurahan selama satu tahun. Penyusunan LKPPK Akhir Tahun Anggaran ini, dengan cara mengumpulkan data dari berbagai pihak mulai dari Perangkat Kalurahan, Lembaga Kalurahan, hingga menggali potensi yang ada di masyarakat melalui identifikasi masalah untuk dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di tahun berikutnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang sudah turut serta membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan Kalurahan selama satu tahun, dan juga pihak yang sudah mendukung dalam penyelesaian LKPPK ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak terutama dari anggota Bamuskal sehingga kami dapat memperbaikinya pada tahun berikutnya.

Semoga laporan ini dapat mendorong masyarakat Kalurahan untuk mewujudkan cita-cita dan rasa memiliki yang tinggi dengan keikutsertaan dalam setiap kegiatan Kalurahan dan semoga laporan ini bisa bermanfaat bagi Pemerintah Kalurahan Trimurti serta semua pihak yang berkepentingan.

Trimurti, 06 Maret 2021
Lurah Trimurti

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL ★ KAPANEWON SRANDAKAN ★ LURAH TRIMURTI

AGUS PURWAKA, ST.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum 1
1.3. Tujuan Penyusunan Laporan 2
1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan 3
1.5. Strategi dan Kebijakan 4

BAB II LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
2.1. Program Kerja PenyelenggaraanPemerintahan Kalurahan..... 6
2.2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan..... 9
2.3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan 10
2.4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat..... 10
2.5. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa 11
2.6. Keberhasilan yang Dicapai 18
2.7. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya yang Ditempuh 21

BAB III PENUTUP..... 22

LAMPIRAN
1. Data Kependudukan
2. Data Regulasi Kalurahan

Trimurti, 06 Maret 2021
Lurah Trimurti

AGUS PURWAKA, ST.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di kabupaten, maka sebuah desa diharuskan membuat Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) sebagai tolok ukur keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Kalurahan dalam satu tahun.

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Kalurahan menjadi lebih terarah dan runtut, sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Kalurahan bisa dilaporkan di akhir tahun kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran merupakan penjabaran kinerja Pemerintah Kalurahan selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak. LKPPK ini juga melaporkan capaian kegiatan pembangunan selama1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kalurahan dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

1.2. Dasar Hukum

a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa jogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang tentang Keistimewa Daerah Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
c) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor5495);
d) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2050 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
f) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
k) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
m) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
n) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
o) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020tentang Perubahan atasPeraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 47);

p) Peraturan Bupati Bantul No 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2020;
q) Peraturan Desa Trimurti Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Trimurti Tahun 2019-2024;
r) Peraturan Desa Trimurti Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Hak;
s) Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
t) Peraturan Desa Trimurti Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020;

1.3. Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran mempunyai tujuan sebagai berikut:

- Agar Kalurahan memiliki dokumen LKPPD Akhir Tahun Anggaran yang berkekuatan hukum tetap.
- Sebagai dasar/pedoman evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan pada tahun berikutnya.
- Untuk tolok ukur pencapaian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang bisa dipertanggungjawaban kepada masyarakat setiap akhir tahun.

1.4. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Kalurahan dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, LPMK, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

a. Visi Kalurahan

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana Kalurahan Trimurti harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholder's*.

Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka menengah yang ingin diraih oleh Lurah yang dirumuskan selama 6 tahun kedepan. Cita-cita itulah yang kemudian mengerucut sebagai Visi Lurah. Adapun Visi Lurah Trimurti adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA KALURAHAN TRIMURTI SEBAGAI "GERBANG UTAMA" BANTUL.

"GERBANG UTAMA" :GERAKAN PEMBANGUNAN DISEGALA BIDANG UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal) dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi, mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada

anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat.

b. Misi Kalurahan

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Hakekat misi merupakan turunan dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Misi merupakan penjabaran lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi desa selama masa enam tahun.

Lurah Trimurti seperti yang sudah dijabarkan di atas, dalam melaksanakan visinya, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah **Misi** KalurahanTrimurti sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan fungsi Pemerintah Kalurahan dan Lembaga-lembaga Kalurahan maupun pedukuhan serta kelompok-kelompok kegiatan di masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang tertib, tentram, demokratis, agamis dan berbudaya dengan semangat kebersamaan dan kegotong-royongan.
3. Meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat dengan prioritas perhatian pada ibu hamil dan menyusui serta balita, remaja dan lansia bersama-sama dengan kader desa, puskesmas dan instansi terkait lainnya.
4. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kalurahan Trimurti dengan prioritas perhatian pendidikan anak usia dini dan TK termasuk pengelola dan sarana prasarananya.
5. Mengembangkan Kalurahan Trimurti sebagai desa persinggahan yang menunjang pengembangan jalur wisata, jalur bandara “NYIA”, jalur lintas provinsi maupjn wajah depan Yogyakarta sehingga bisa meningkatkan kegiatan

perekonomian, kewirausahaan, dan kesejahteraan masyarakat.

6. Peningkatan dan optimalisasi peranan BUMKal untuk mengembangkan sumber daya dan potensi Kalurahan serta pendapatan asli Kalurahan.
7. Mengoptimalkan kegiatan generasi muda melalui olahraga, seni, budaya, keagamaan dan kegiatan lainnya agar tercipta generasi muda yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berakhlak mulia.
8. Secara bertahap mengurangi pengangguran dan kemiskinan dengan kegiatan perlatihan maupun peluang usaha bekerjasama dengan instansi terkait.
9. Pembinaan dan pengembangan kegiatan seni, budaya dan home industry sebagai potensi unggulan Kalurahan.
10. Pembangunan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dengan pemanfaatan lahan pertanian dan pekarangan yang ada dengan intensifikasi maupun kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pembangunan Kalurahan yang berwawasan lingkungan di semua padukuhan.

1.5. Strategi danKebijakan

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan program di Kalurahan diawali dengan Musyawarah Kalurahan yang menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dan Lembaga Kalurahan dalam rangka penggalian gagasan. Dari penggalian gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di Kalurahan dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kalurahan juga rutin mengadakan kegiatan bersama Lurah, dimana dalam kegiatan tersebut, masyarakat bebas memberikan saran maupun kritik tentang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan maupun pembangunan desa. Dengan adanya kegiatan tersebut, aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Strategi lain yang menjadi andalan Pemerintah Kalurahan adalah program pembangunan partisipatif yang mana dalam

proses pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, masyarakat dilibatkan sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Di samping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Kalurahan menerapkan sistem pemerintahan terbuka atau *Open Goverment* yang mana semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangunan Kalurahan, dan pengelolaan keuangan desa melalui berbagai media yang telah disediakan seperti *web* Kalurahan dengan alamat www.trimurti-bantul.desa.id, *facebook* kalurahan dengan nama Kalurahan Trimurti, *instagram* Kalurahan Trimurti, dan *e-mail* dengan alamat pemdes.trimurti@gmail.com, desa.trimurti@bantulkab, dan *Youtube* Desa Trimurti.

Selanjutnya program dan kebijakan Pemerintah Kalurahan yang menjadi fenomenal adalah Program Berbasis Lingkungan yang mana seluruh RT di wilayah Kalurahan diberi dana stimulan dari APBKal untuk membangun lingkungannya masing-masing dengan cara swadaya masyarakat.

Dari kebijakan yang tertulis di atas, Pemerintah Kalurahan berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat *(Trust)* untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan *(Sustainable Development)* dengan cara terbuka.

BAB II

LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

2.1. Program Kerja Penyelenggaraan PemerintahanKalurahan

Program kerja penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan Kalurahan yang baik. Selain itu program kerja penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan juga mengacu kepada Peraturan Desa Trimurti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 -2024 dan Peraturan Desa Trimurti Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun2020.

a. Peraturan Perundang-undangan

1. Jumlah Peraturan Desa yang dibuat selama tahun 2020 sebanyak 9 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPK ini.
2. Jumlah Peraturan Lurah Desa yang dibuat selama tahun 2020 sebanyak 6 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPKini.
3. Jumlah Keputusan Lurah Desa yang dibuat selama tahun 2020 sebanyak 39 dengan daftar rincian terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari LPPKini.

b. Kependudukan

1. JumlahPenduduk
   - Jumlah Jiwa : 18.290 Jiwa
   - Laki-laki : 9.034 Jiwa
   - Perempuan : 9.256 Jiwa
   - Jumlah KK : 6.294 KK

2. Jumlah Penduduk BerdasarkanUsia

Usia	Laki-laki	Perempuan		Usia	Laki-laki	Perempuan
0-12 bulan	91 orang	71 orang		39 tahun	148 orang	143 orang
1 tahun	135 orang	110 orang		40 tahun	142 orang	146 orang
2 tahun	105 orang	105 orang		41 tahun	125 orang	108 orang
3 tahun	108 orang	116 orang		42 tahun	143 orang	127 orang
4 tahun	123 orang	128 orang		43 tahun	139 orang	139 orang
5 tahun	121 orang	118 orang		44 tahun	125 orang	126 orang
6 tahun	124 orang	134 orang		45 tahun	114 orang	127 orang
7 tahun	134 orang	120 orang		46 tahun	117 orang	136 orang
8 tahun	122 orang	131 orang		47 tahun	114 orang	120 orang
9 tahun	162 orang	131 orang		48 tahun	134 orang	130 orang
10 tahun	117 orang	121 orang		49 tahun	165 orang	151 orang
11 tahun	147 orang	141 orang		50 tahun	137 orang	144 orang
12 tahun	119 orang	133 orang		51 tahun	138 orang	132 orang
13 tahun	143 orang	130 orang		52 tahun	131 orang	121 orang
14 tahun	128 orang	124 orang		53 tahun	146 orang	151 orang
15 tahun	113 orang	103 orang		54 tahun	107 orang	140 orang
16 tahun	132 orang	127 orang		55 tahun	115 orang	148 orang
17 tahun	125 orang	129 orang		56 tahun	117 orang	114 orang
18 tahun	112 orang	116 orang		57 tahun	111 orang	126 orang
19 tahun	113 orang	100 orang		58 tahun	127 orang	146 orang
20 tahun	119 orang	123 orang		59 tahun	117 orang	125 orang

Usia	Laki-laki	Perempuan		Usia	Laki-laki	Perempuan
21 tahun	131 orang	122 orang		60 tahun	114 orang	94 orang
22 tahun	133 orang	123 orang		61 tahun	101 orang	84 orang
23 tahun	140 orang	128 orang		62 tahun	80 orang	99 orang
24 tahun	127 orang	130 orang		63 tahun	86 orang	86 orang
25 tahun	141 orang	135 orang		64 tahun	91 orang	90 orang
26 tahun	123 orang	137 orang		65 tahun	64 orang	65 orang
27 tahun	124 orang	141 orang		66 tahun	75 orang	69 orang
28 tahun	126 orang	126 orang		67 tahun	52 orang	68 orang
29 tahun	126 orang	129 orang		68 tahun	54 orang	76 orang
30 tahun	129 orang	128 orang		69 tahun	61 orang	64 orang
31 tahun	120 orang	109 orang		70 tahun	51 orang	75 orang
32 tahun	120 orang	124 orang		71 tahun	31 orang	31 orang
33 tahun	134 orang	133 orang		72 tahun	37 orang	34 orang
34 tahun	126 orang	134 orang		73 tahun	36 orang	81 orang
35 tahun	146 orang	142 orang		74 tahun	40 orang	55 orang
36 tahun	138 orang	154 orang		75 tahun	39 orang	43 orang
37 tahun	142 orang	102 orang		Lebih dari 75 tahun	359 orang	507 orang
38 tahun	132 orang	127 orang		**Total**	**9034 orang**	**9256 orang**

3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	807 orang	782 orang
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	1554 orang	1506 orang

Tamat SD/sederajat	704 orang	785 orang
Tamat SMA/sederajat	3013 orang	2745 orang
Tamat D-2/sederajat	45 orang	53 orang
Tamat D-3/sederajat	103 orang	117 orang
Tamat S-1/sederajat	2532 orang	2713 orang
Tamat S-2/sederajat	45 orang	53 orang
Tamat S-3/sederajat	3 orang	2 orang
Tamat SLB C	19 orang	38 orang
Jumlah Total	17.619 **orang**	

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan MataPencaharian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Pegawai Negeri Sipil	198 orang	230 orang
Pedagang barang kelontong	88 orang	122 orang
Montir	38 orang	0 orang
Bidan swasta	0 orang	12 orang
POLRI	34 orang	3 orang
Tukang Batu	133 orang	0 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	1454 orang	1509 orang
Belum Bekerja	1316 orang	1305 orang
Pelajar	1554 orang	1506 orang
Ibu Rumah Tangga	569 orang	889 orang
Perangkat Desa	20 orang	7 orang
Buruh Harian Lepas	2251 orang	2123 orang

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan	5 orang	0 orang
Karyawan Honorer	9 orang	1 orang
Wartawan	2 orang	0 orang
Pemuka Agama	1 orang	1 orang
Apoteker	0 orang	2 orang
Pelaut	1 orang	0 orang
Jumlah Total Penduduk	15.383 **orang**	

c. Pertanahan

1. Luas Tanah
   - LuasTanah : 618,8000 ha
   - SudahBersertifikat : 98,6 %
   - BelumBersertifikat : 1,4%
   - TanahKasDesa : 32 ha
2. Peruntukan
   - Jalan : 96,31 ha
   - Pekarangan/Perumahan : 442,27 ha
   - Persawahan : 40,97 ha
   - Bangunan Umum : 135,56 ha

d. Manajemen Pemerintahan

- Lurah : 1 orang
- Carik : 1 orang
- Kepala Dusun : 19 orang
- Jagabaya : 1 orang
- Ulu-ulu : 1 orang
- Kamituwo : 1 orang
- Kepala Urusan Tata Laksana: 1 orang
- Kepala Urusan Danarta : 1 orang
- Kepala Urusan Pangripta : 1 orang
- Staf TU : 1 orang

- Tenaga Bantu Administrasi : 7 orang
- Tenaga Kebersihan : 2 orang
- Jumlah Anggota BPD : 9 orang
- Jumlah Anggota LPMD : 22 orang
- Murenbang Desa : 1 kali

e. Ketentraman dan Ketertiban

- Jumlah AnggotaLinmasPa : 101 orang
- Jumlah AnggotaLinmasPi : 2 orang
- JumlahPoskamling : 52 unit
- Jumlah Kejadian Kriminal : -
- Jumlah Bencana Alam : -
- Jumlah Operasi Penertiban : -
- Jumlah Kecelakaan Remaja : -

f. Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan

- RT/RW : 135 orang
- PKK : 34 orang
- Karang Taruna : 75 orang
- Posyandu : 20 Posyandu
- LPMK : 19 LPMK
- BUMKal : 1 organisasi
- Kelompok Tani : 2 organisasi
- Linmas PA &PI : 103 Orang
- Lembaga Kebudayaan : 1 organisasi
- Lembaga Pendidikan Dini : 20 PAUD

2.2. Program Kerja

Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan terkosentrasi kepada pembangunan infrastruktur Kalurahan yang mengacu pada Peraturan Desa Trimurti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019 - 2024 dan Peraturan Desa Trimurti Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun2020 yang meliputi:

a. Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
b. Pembangunan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan.
c. Pembangunan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan.
d. Pembangunan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
e. Pembangunan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak.

2.3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan BelanjaKalurahan

Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Kalurahan telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan terbuka *(Open Government)*.

Selain pengelolaan dengan sistem terbuka dan akuntabel, agar kebijakan pengelolaan keuangan desa lebih terarah maka pemerintah Kalurahantelah melakukan perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tentang APBDesa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Bupati BantulNomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Sebagai implementasi dari peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, maka Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal menetapkan Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa		Rp 4.082.299.140,00
- Dana Desa	Rp	1.536.491.000,00
- Alokasi Dana Desa	Rp	1.555.151.000,00
- Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Rp	232.325.140,00
- Bantuan keuangan	Rp	630.832.000,00
- Pendapatan Asli Desa	Rp	127,500,000,00

b. Belanja Desa Rp. 4.401.335.420,00

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp2.275.424.669,28
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Rp1.262.278.302,32
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 494.727.620,58
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 291.673.572,11
- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Rp 77.231.255,71

Surplus/Defisit Rp. 319.036.280,00

c. Pembiayaan Desa
   - Penerimaan Pembiayaan Rp. 319.036.280,00
   - Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,00

   Selisih Pembiayaan (a – b) Rp. 319.036.280,00

b. Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Setelah APBDesa disahkan bersama BPD, Pemerintah Desa mulai menjalankan kegiatan pemerintahan. Dikarenakan ada perubahan pendapatan sehingga mempengaruhi kebijakan belanja, maka Pemerintah Desa bersama BPD menyepakati Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Anggaran Perubahan Pertama Pendapatan dan Belanja Desa Trimurti Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

Semula	Rp.	4.082.299.140,00
Berkurang	Rp.	188.712.001,00
Pendapatan Desa setelah perubahan	Rp.	3.893.587.139,00

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Semula	Rp.	2.275.424.669,28
Berkurang	Rp.	157.284.000,00
Setelah perubahan	Rp.	2.118.140.669,28

b. Bidang Pembangunan

Semula	Rp.	1.262.278.302,32
Berkurang	Rp.	454.157.992,81
Setelah perubahan	Rp.	808.120.309.51

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Semula	Rp.	494.727.620,58
Berkurang	Rp.	125.256.995,98
Setelah perubahan	Rp.	369.470.624,60

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Semula	Rp.	291.673.572,11
Berkurang	Rp.	139.023.500,00
Setelah perubahan	Rp.	152.650.072,11

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Semula	Rp.	77.231.255,71
Bertambah	Rp.	655.307.471,79
Setelah perubahan	Rp.	732.538.727,50

Jumlah Belanja

Semula	Rp.	4.401.335.420,00
Berkurang	Rp.	220.415.017,00
Setelah perubahan	Rp.	4.180.920.403,00

Surplus/Defisit

Semula	(Rp.	319.036.280,00)
Bertambah	Rp.	31.703.016,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	(Rp.	287.333.264,00)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp.	319.036.280,00
Berkurang	Rp.	31.703.016,00
Setelah perubahan	Rp.	287.333.264,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp.	0,00
Berkurang	Rp.	0,00
Setelah perubahan	Rp.	0,00

Selisih Pembiayaan (a – b)

Semula	Rp.	0,00
Bertambah	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b) setelah Perubahan	Rp.	0,00

Anggaran Perubahan Kedua Pendapatan dan Belanja Desa TrimurtiTahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa Semula	Rp.	3.893.587.139,00
Berkurang	Rp.	0,00
Pendapatan Desa setelah perubahan	Rp.	0,00

2. BelanjaDesa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Semula	Rp.	2.118.140.669,28
Berkurang	Rp.	0,00
Setelah perubahan	Rp.	0,00

b. Bidang Pembangunan

Semula	Rp.	808.120.309,51
Berkurang	Rp.	0,00
Setelah perubahan	Rp.	0,00

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Semula	Rp.	369.470.624,60

Berkurang	Rp.	0,00
Setelah perubahan	Rp.	0,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Semula	Rp.	152.650.072,11
Berkurang	Rp.	0,00
Setelah perubahan	Rp.	0,00

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Semula	Rp.	732.538.727,50
Bertambah	Rp.	0,00
Setelah perubahan	Rp.	0,00

Jumlah Belanja

Semula	Rp.	4.180.920.403,00
Berkurang	Rp.	0,00
Setelah perubahan	Rp.	0,00

Surplus/Defisit

Semula	(Rp.	287.333.264,00)
Bertambah	Rp.	0,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	(Rp.)	

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp.	287.333.264,00
Berkurang	Rp.	0,00
Setelah perubahan	Rp.	0,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp.	0,00
Berkurang	Rp.	0,00
Setelah perubahan	Rp.	0,00

Selisih Pembiayaan (a – b)

Semula	Rp.	0,00
Bertambah	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b) setelah Perubahan	Rp.	0,00

c. Peraturan Kalurahan tentang Pertanggungjawaban RealisasiAPBKal

Setelah tahun anggaran berakhir, Pemerintah Kalurahan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.921.237.057,00
2.	Belanja Kalurahan	
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.986.327.619,00
	b. Bidang Pembangunan	Rp. 652.267.039,50
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 247.117.275,00
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 69.512.525,00
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak	Rp. 852.309.887,00
	Jumlah Belanja	Rp. 3.807.534.345,50
	Surplus/Defisit	Rp. 113.702.711,50
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 287.33.264,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 287.333.264,00

d. Rincian Anggaran Pendapatan dan BelanjaKalurahan

1. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan disusun berdasarkan realisasi pendapatan Kalurahan pada tahun berkenan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan Kalurahan yang meliputi Pendapatan Asli Kalurahan, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain.

Adapun Rincian Pendapatan KalurahanTahun 2020 sebesar Rp 3.921.237.057 (Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah) yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	*2*	*3*
4	**PENDAPATAN**	
4.1.	**Pendapatan Asli Desa**	
4.1.2	Hasil Aset Desa	
4.1.2.1	Pengelolaan Tanah Kas Desa	76.786.400,00
4.1.2.7	Hasil Kios Milik Desa	17.700.000,00
4.1.2.91	Bangunan Desa	6.416.000,00
4.1.2.99	Lain-lain Hasil Aset Desa	2.698.000,00
4.2.	**Pendapatan Transfer**	
4.2.1.	Dana Desa	1.525.684.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	235.681.296,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.417.637.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten	630.832.000,00
4.3.	**Pendapatan Lain-lain**	
4.3.9.	Bunga Bank	7.802.361,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**3.921.237.057,00**

2. Belanja Kalurahan

Dalam kebijakan belanja, pemerintah Kalurahan mengacu kepada prinsip efisien dan akuntabel dengan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan mengutamakan kepada usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang Kalurahan yang dituangkan ke dalam RKP Kalurahan.

Adapun Rincian Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2019 pasal 16 terdiri dari :

a. Penyelenggaraan PemerintahanKalurahan;

b. Pelaksanaan PembangunanKalurahan;

c. Pembinaan KemasyarakatanKalurahan;

d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan;dan

e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan

Untuk Tahun Anggaran 2020 total Belanja Kalurahan sebesar Rp 3.921.237.057,00 (Tiga Miliar Sembilanratus Dua puluh Satu Juta Dua ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Tujuh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	*2*	*3*
5	BELANJA	
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.986.327.619,00
11	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan	1.781.860.678,00
111	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa	47.808.000,00
112	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa	749.246.000,00
113	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah Desa dan Pamong Desa	21.287.251,00
114	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	268.475.177,00
115	Penyediaan Tunjangan BPD	88.200.000,00
116	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.396.250,00
117	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	0,00
1.192	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD	85.828.000,00
1.193	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah Desa, Pamong Desa dan BPD	18.788.000,00
1.194	Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh	500.832.000,00
12	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	130.690.515,00

121	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	20.832.000,00
122	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.943.920,00
123	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	98.914.595,00
13	Pengelolaan Administrasi Kependudukan,	8.304.000,00
132	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	0,00
133	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	660.000,00
135	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.644.000,00
14	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	35.316.300,00
141	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	0,00
142	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.660.000,00
143	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.295.000,00
144	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.187.000,00
146	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	0,00
147	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.545.500,00
148	Pengembangan Sistem Informasi Desa	8.433.800,00
1.410	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	7.195.000,00
15	Sub Bidang Pertanahan	30.156.126,00
156	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	30.156.126,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	652.267.039,50
21	Sub Bidang Pendidikan	86.809.322,00
211	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	78.780.522,00
213	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	0,00

216	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	0,00
218	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	8.028.800,00
22	Sub Bidang Kesehatan	72.514.257,50
221	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	950.000,00
222	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	47.974.257,50
223	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	19.640.000,00
224	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.950.000,00
23	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	359.457.035,00
232	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	0,00
2.311	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	313.218.920,00
2.320	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	46.238.115,00
24	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	117.420.695,00
241	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	76.947.890,00
246	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	13.935.190,00
247	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,	0,00
248	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	26.537.615,00
2.413	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	0,00
28	Sub Bidang Pariwisata	16.065.730,00
283	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	16.065.730,00
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	247.117.275,00
31	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	0,00
312	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	0,00

313	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	0,00
314	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0,00
32	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	58.809.005,00
321	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	9.430.000,00
322	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	0,00
323	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	0,00
325	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa	49.379.005,00
3.290	Pembinaan di Bidang Keagamaan	0,00
33	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	182.953.270,00
331	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	0,00
335	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	168.348.270,00
336	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	14.605.000,00
34	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
342	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	0,00
343	Pembinaan PKK	5.355.000,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	69.512.525,00
42	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
421	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	0,00
424	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	0,00
43	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
432	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	0,00
44	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,	
441	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0,00

443	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	0,00
45	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan	
453	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non	0,00
46	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	
462	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	0,00
47	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
471	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	69.512.525,00
474	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	0,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	852.309.887,00
51	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	
511	Kegiatan Penanggulanan Bencana	21.150.000,00
52	Sub Bidang Keadaan Darurat	
521	Penanganan Keadaan Darurat	47.880.587,00
53	Sub Bidang Keadaan Mendesak	
531	Penanganan Keadaan Mendesak	783.279.300,00
	JUMLAH BELANJA	3.807.534.345,50
	Surplus / (defisit)	113.702.711,50

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. PengeluaranPembiayaan

Tahun Anggaran 2020 selisih pembiayaan sebesar Rp287.333.264,00 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	*2*	*3*
6	PEMBIAYAAN	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	287.333.264,00
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan	-
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.01.	Pembentukan Dana Cadangan	-
6.2.02.	Penyertaan Modal Desa (BUMDesa)	-
6.2.09.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	287.333.264,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	287.333.264,00
	SILPA TAHUN BERJALAN	401.035.975,50

2.4. Keberhasilan Yang Dicapai

Selama tahun 2020 Pemerintah Kalurahan dalam menyelenggarakan pemerintahan dibilang cukup berhasil dengan berbagai prestasi yang telah diraih, adapun keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah kalurahan meliputi:

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Pemerintah Kalurahan telah berhasil mempertahankan predikat tertib administrasi baik pada pemerintah desa maupun lembaga desa. Pemerintah Kalurahan juga telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatan meliputi:

1. Penyediaan penghasilan tetap dan dan tunjangan Lurah meliputi tunjangan jabatan dan tunjangan istri Lurah.
2. Penyediaan penghasilan tetap dan dan tunjangan Lurah meliputi tunjangan jabatan dan tunjangan suami/istri perangkat kalurahan termasuk tunjangan jabatan Carik.
3. Penyediaan jaminan kesehatan/pembayaran BPJS Kesehatan bagi Lurah dan perangkat Kalurahan.
4. Penyediaan operasional kantor meliputi tunjangan

pengelola keuangan kalurahan, penghasilan staf honorer, pembayaran listrik, telepon, surat kabar, penyediaan ATK, alat kebersihan kantor, alat listrik, fotokopy, makan minum rapat, perjalanan dinas, makan minum harian, bahan bakar gas, dan penyediaan pakaian batik.

5. Penyediaan Tunjangan BPD.
6. Penyediaan Operasional BPD
7. Penyediaan tunjangan Hari Raya bagi Lurah dan Pamong Kalurahan.
8. Pemberian tunjangan Purna Tugas bagi Dukuh Klurahan
9. Penyediaan tambahan penghasilan pengganti tanah pelungguh
10. Penyediaan asset tetap desa meliputi pembelian AC, aksesoris ruangan, kursi tunggu, radio komunikasi (HT), dan belanja modal 1 set alat pancar ulang/RPU.
11. Pemeliharaan gedung kantor meliputi pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan alat kantor/rumah tangga, dan pemeliharaan gedung kantor.
12. Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Kalurahan
13. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Administratif berupa Fasilitasi Puskesos dan Pendataan DTKS.
14. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
15. Penyususnan Dokumen Perencanaan Keuangan Desa
16. Penyususnan Laporan Lurah Desa dan Informasi Kepada Masyarakat.
17. Pengembangan Sistem Informasi Desa
18. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa, Halaman Kantor Kalurahan Trimurti
19. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan

Pemerintah Kalurahan telah berhasil melaksanakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang meliputi:

1. Pengelolaan Perpustakaan Kalurahan, Griya Baca Trimurti
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman di Pedukuhan Lopati, Bendo, Celan, Mangiran, Sapuangin, Proketen dan Nengahan
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan di Pedukuhan Jetis dan Cagunan
4. Dukungan Pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN, di Pedukuhan Srandakan, Puron, Gunungsaren Lor, Lopati, Puluhan Kidul
5. Pembangunan /Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK di Pedukuhan Sapuangin
6. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) di Pedukuhan Gunungsaren Kidul.
7. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan yaitu pelatihan pembuatan souvenir dari bambu.
8. Dukungan terhadap penyelenggaraan PAUD di Desa Trimurti berupa PMT-AS dan Pembinaan Guru PAUD.
9. Fasilitasi kegiatan Kampung KB Puron
10. Dukungan terhadap penyelenggaraan posyandu di Desa Trimurti berupa Pemberian PMT untuk Balita.
11. Pembinaan Kader Kesehatan Desa
12. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

c. Pembinaan Kemasyarakatan Klaurahan

Di bidang pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, keberhasilan yang dicapai adalah pada sektor pembinaan lembaga kesehatan, pendidikan, keagamaan, sosial budaya, ekonomi, dan pembinaan penguatan kebangsaan, serta pembinaan pemuda dan kegiatan olah ragayang meliputi:

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kalurahan di Pedukuhan Proketen

2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kalurahan yaitu pembangunan Gedung Futsal di pedukuhan Nengahan
3. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa

d. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Keberhasilan yang dicapai di bidang pemberdayaan masyarakat antara lain adalah pemberdayaan lembaga Perempuan (PKK) dan pemberdayaan di bidang kesehatan dengan kegiatan terkosentrasi pada Posyandu sebagai pelayanan dasar kesehatan masyarakat atau dengan istilah pemberdayaan Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).

Selain itu Pemerintah Kalurahan juga melakukan pemberdayaan pada BUMDesa sebagai bentuk upaya peningkatan ekonomi. Di tahun ini, BUMDesa mendapat banyak bantuan, baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Bantuan tersebut digunakan untuk pengembangan wisata desa yang harapannya bisa mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Kalurahan juga telah berhasil melaksanakan beberapa kegiatanmeliputi:

1. Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Kalurahan, yaitu pembangunan kios pujasera milik kalurahan Trimurti

e. Prestasi Kalurahan dalam Lomba Kalurahan

Pemerintah Kalurahan selama tahun 2020 tidak mengikuti lomba Kalurahan karena yang mewakili lomba Kalurahan dari Kapanewon Srandakan adalah Kalurahan Poncosari. Namun, Kalurahan Trimurti pada tahun 2020 mengikuti Lomba Perpustakaan tingkat Kabupaten Bantul dan memperoleh Juara II Tingkat Kabupaten Bantul.

2.5. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Upaya Yang Ditempuh

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Kalurahan Trimurti, tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaran pemerintahan kalurahan selama tahun 2020 antara lain:

1. Masalah pembangunan masih memerlukan penanganan serius, terutama karena kurangnya sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan, dimana dana yang tersedia masih jauh lebih kecil dari besarnya usulan warga pada Musrenbang Kalurahan, sehingga menimbulkan kesan bahwa usulan warga banyak yang diabaikan ataupun pembangunan dirasa kurang adil dan kurang merata antara satu lingkungan dengan lingkungan yangl ain.

   Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang ditempuh Pemerintah Kalurahan adalah dengan cara memberikan pemahaman pada masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa juga mencari bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi ataupun Pemerintah Pusat untuk menutupi kekurangan dana yang bersumber dari APBKalurahan. Dan melalui BUMKalurahan, Pemerintah Desa juga berharap adanya pemasukan untukPAD.
2. Peraturan perundang-undangan yang sering berganti dan bersifat multitafsir. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya percepatan pelaksanaan roda pemerintahan desa demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan seringnya perubahan tersebut, Pemerintah Desa dituntut untuk terus beradaptasi.

   Untuk meminimalisir permasalahan tersebut, Pemerintah Kalurahan selalu melakukan koordinasi dan konsultasi baik kepada Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten. Selain itu juga melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kalurahan.

3. Beberapa kegiatan yang sumber anggarannya dari DD (Dana Desa) tahun 2020 ini ada yang tidak bisa dilaksanakan karena anggarannya dialihkan/digunakan untuk penanganan covid-19 dan untuk BLT (Banguan Langsung Tunai), kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di tahun 2020 meliputi :
   1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ di pedukuhan Gunungsaren Lor dan Gunungsaren Kidul

2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang, Corblok jalan Dk.Srandakan RT 05
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman di Pedukuhan Puron
4. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
5. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kalurahan (penampungan, Bank Sampah, dll)
6. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengelolaan, penggilingan)
7. Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
8. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (pengrajin,pedagang,industri rumah tangga, dll)
9. Penyuluhan dan pelatihan Pendidikan Masyarakat (Pelatihan membatik)
10. Kegiatan Posyandu Remaja
11. Pembinaan Kader KPM dan Pelatihan PMBA bagi kader kesehatan.

BAB III

PENUTUP

Demikian penjelasan mengenai Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2020. Pada intinya, Pemerintah Kalurahan sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan kalurahan dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam mengemban tugas melaksanakan roda pemerintahan masih terdapat kekurangan dan masih banyak hal-hal yang belum dituntaskan. Untuk itu atas nama Pemerintah Kalurahan menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh elemen mulai Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kapanewon, dan masyarakat Kalurahan tentunya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak baik pemerintah desa maupun lembaga kalurahan atas kerja samanya dan semua pihak yang telah mendukung penyelesaian LKPPD ini, dengan harapan semoga laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh Bamuskal.

Akhirnya marilah kita memohon kepada Allah SWT agar kita semua selalu mendapatkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga pembangunan Kalurahandapat berjalan lancar, aman, dan damai guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aamiin.

Trimurti, 06 Maret 2021
Lurah Trimurti



AGUS PURWAKA, ST.

LAMPIRAN

LAPORAN KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL AKHIR TAHUN 2020

No	Dusun	Jumlah Penduduk Awal Tahun 2020					Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2020					Ket.
		L	P	Jumlah	KK	KSK	L	P	Jumlah	KK	KSK	
1	SRANDAKAN											Jumlah penduduk Kalurahan Trimurtidi akhir tahun 2020 berkurang ..... jiwa
2	GERSO											
3	KLURAHAN											
4	PROKETEN											
5	JETIS											
6	SAWAHAN											
7	PURON											
8	PULUHAN KIDUL											
9	PULUHAN LOR											
10	PEDAK											

11	GUNUNGSAREN KIDUL											
12	GUNUNGSAREN LOR											
13	NENGAHAN											
14	LOPATI											
15	BENDO											
16	CELAN											
17	CAGUNAN											
18	MANGIRAN											
19	SAPUANGIN											
JUMLAH												

Trimurti, 06 Maret 2021

Lurah Trimurti

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRAGEN

AGUS PURWAKA, ST.

DAFTAR PERATURAN DESA TRIMURT TAHUN 2020

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Desa	Tanggal	Ket
1	01 Tahun 2020	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2019	14 Februari 2020	-
2	02 Tahun 2020	Peubahan RKPDesa Tahun 2020	11 Mei 2020	-
3	03 Tahun 2020	Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020	11 Mei 2020	-
4	04 Tahun 2020	Kedudukan keuangan Lurah Desa Pamong Desa Staf Desa	15 Juli 2020	-
5	05 Tahun 2020	Perubahan Kedua Atas Perdes No 11 Tahun 2019 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020	28 Juli 2020	-
6	06 Tahun 2020	RKPDes Tahun anggaran 2021	20 Oktober 2020	-
7	07 Tahun 2020	Susunan Tata Organisasi Pemerintah Kalurahan Trimurti	11 Desember 2020	-
8	08 Tahun 2020	Kewenangan Kalurahan Trimurti	11 Desember 2020	-
9	09 Tahun 2020	APBKal tahun Tahun anggaran 2021	28 Desember 2020	

Trimurti, 06 Maret 2021

Lurah Trimurti



AGUS PURWAKA, ST.

DAFTAR PERATURAN LURAH DESA TRIMURTI TAHUN 2020

No	Nomor Peraturan	Nama Peraturan Kepala Desa	Tanggal	Ket
1	01 Tahun 2020	Perubahan Rincian anggarran Tanggap Darurat akibat dampak pandemi covid 19	24 Maret 2020	-
2	02 Tahun 2020	Penenetapan penerima manfaat BLT Dana Desa akibat dampak pandemi covid 19	4 Mei 2020	-
3	03 Tahun 2020	Penjabaran Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020	11 Mei 2020	-
4	04 Tahun 2020	Penenetapan penerima manfaat BLT Dana Desa tahap 4,5, 6	28 Juli 2020	-
5	05 Tahun 2020	Penjabaran Perubahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020	28 Juli 2020	-
6	06 Tahun 2020	Penjabaran APBKal Tahun Anggaran 2021	29 Desember 2020	-

Trimurti, 06 Maret 2021

Lurah Trimurti

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN

AGUS PURWAKA, ST.

DAFTAR KEPUTUSAN KEPALA DESA TRIMURTI TAHUN 2020

No	Nomor SK	Nama Keputusan Kepala Desa	Tanggal	Ket
1	01 Tahun 2020	Pengangkatan Sdr. Landung Rofi'i sebagai tenaga honorer pembantu Kasi Pemerintahan	02 Januari 2020	-
2	02 Tahun 2020	Pengangkatan Sdr. Sudarmaji sebagai tenaga honorer staf Kaur Keuangan	02 Januari 2020	-
3	03 Tahun 2020	Pengangkatan Sdr. Suryanto sebagai tenaga honorer pembantu Kasi Kesejahteraan	02 Januari 2020	-
4	04 Tahun 2020	Pengangkatan Sdr. Hargi okta Figiantara sebagai tenaga honorer pembantu Kasi Pemerintahan	02 Januari 2020	-
5	05 Tahun 2020	Pengangkatan Sdri. Sugiyati sebagai tenaga honorer pembantu Kasi Pelayanan	02 Januari 2020	-
6	06 Tahun 2020	Pengangkatan Sdr. Widyan Oktarynaldi sebagai tenaga honorer pembantu Kasi Pelayanan	02 Januari 2020	-
7	07 Tahun 2020	Pengangkatan Sdr. Sandi Tri Prasetya sebagai tenaga honorer pembantu Kaur Tata Usaha dan Umum	02 Januari 2020	-
8	07B Tahun 2020	Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Trimurti	02 Januari 2020	-
9	08 Tahun 2020	Pengangkatan Sdr. Subagiya sebagai staf Kaur TU	02 Januari 2020	-
10	09 Tahun 2020	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) TA 2020	02 Januari 2020	-
11	10 Tahun 2020	Pemberhentian Sdr. Susanto Suryo Nugroho PLT Dukuh Klurahan	16 Januari 2020	-
12	11 Tahun 2020	Pengangkatan Sdr. Danang Farida Indrajaya sebagai Dukuh Klurahan	16 Januari 2020	-
13	12 Tahun 2020	Pemdamping Pengelolaan Perpustakaan Desa (Sri Winarni)	16 Januari 2020	-
14	13 Tahun 2020	Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Administrasi dan Informasi Desa	16 Januari 2020	-
15	14 Tahun 2020	Pengelola Arsip Desa (Printa Kusumastuti)	16 Januari 2020	-

16	15 Tahun 2020	TPK Intensifikasi Pemungutan PBB	31 Januari 2020	-
17	16 Tahun 2020	Sewa Kas Tanah Desa Yang Digunakan Oleh SMA 1 Srandakan	31 Januari 2020	-
18	17 Tahun 2020	Penunjukan TPK Desa	31 Januari 2020	-
19	18 Tahun 2020	Pengelolaan Gedung Grhamurti	31 Januari 2020	-
20	19 Tahun 2020	Pengangkatan Tenaga Pendidik PAUD, KB, SPS	31 Januari 2020	-
21	20 Tahun 2020	Pengangkatan Tenaga Honorer Guru TK PKK	31 Januari 2020	-
22	21 Tahun 2020	TPK Penyusunan Pendataan dan Pemutakhiran	03 Februari 2020	-
23	22 Tahun 2020	TPK Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	03 Maret 2020	-
24	23 Tahun 2020	Panitia Pengisian Staf Honorer	09 Maret 2020	-
25	24 Tahun 2020	Pembentukan KSM Ipal Komunal DK. I Srandakan	19 Maret 2020	-
26	25 Tahun 2020	Penetapan Bencana Darurat Covid19	23 Maret 2020	-
27	26 Tahun 2020	Pembentukan Tim Kewaspadaan Covid19	23 Maret 2020	-
28	26B Tahun 2020	SK RDS	23 maret 2020	-
29	27 Tahun 2020	Pengangkatan Sdr. Zainuddin Muhammad Qomar sebagai Tenaga Pembantu Honorer Kaur TU Umum (Penjaga)	24 Maret 2020	-
30	28 Tahun 2020	Pengangkatan Sdr. Zainuddin Muhammad Qomar sebagai Tenaga Pembantu Honorer Kaur TU Umum (Penjaga)	24 Maret 2020	-
31	28B Tahun 2020	Pembentukan G2R Desa Trimurti	28 Mei 2020	-

32	29 Tahun 2020	Pengangkatan Sdr. Ismawan sebagai staf keuangan	24 Maret 2020	-
33	29 Tahun 2020	Pengangkatan Sdr. Sumarjo sebagai tenaga honorer pembantu Kasi TU dan Umum (Penjaga)	18 Juni 2020	-
34	30 Tahun 2020	Pembentukan Tim Relawan Desa Lawan Covid19	29 April 2020	-
35	30B Tahun 2020	Daftar Nama Satlinmas Desa Trimurti	14 Juli 2020	-
36	31 Tahun 2020	Pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan Pemelihara Bantuan Pemerintah Kegiatan Sanitasi	10 Juni 2020	-
37	31 Tahun 2020	Pembentukan Kelompok 1 Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2020	22 Juli 2020	-
38	32 Tahun 2020	Pembentukan Kelompok 2 Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2020	22 Juli 2020	-
39	33 Tahun 2020	Pembentukan Tim RKP Desa	30 Juli 2020	-
40	34 Tahun 2020	Pembentukan Tim Verifikasi RKP Desa	30 Juli 2020	-
41	35 Tahun 2020	Pembentukan Tim Pemakaman Jenazah Covid19	29 September 2020	-
42	35B Tahun 2020	Puskesos	22 Oktober 2020	-
43	36 Tahun 2020	Penetapan Potensi Unggulan Desa Budaya Trimurti	16 November 2020	-
44	37 Tahun 2020	Pengurus Karang Taruna Th. 2020-2023	23 November 2020	-
45	38 Tahun 2020	Pembentukan Pokdarwis Desa Trimurti	30 November 2020	-
46	39 Tahun 2020	Perubahan Nama Pamong Desa Menjadi Pamong Kalurahan	14 Desember 2020	
	39B Tahun 2020	Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) Murti Jaya	26 Juni 2020	

Trimurti, 06 Maret 2021

Kepala Desa

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN

AGUS PURWAKA, ST